

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp. (0334) 8780990
LUMAJANG - 67316

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, diperlukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar pelaksanaan tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2022 yang terangkum dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran di Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Harapan kami dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja kegiatan di Tahun 2022.

Lumajang, Agustus 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

Ir. PAIMAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19670606 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	13
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	42
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH...	48
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..	55
3.3. Program dan Kegiatan.....	59
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	92
4.1. Program Utama	92
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja	93
4.3. Alokasi Anggaran.....	94
BAB V : PENUTUP.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka secara sinergi pula Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis PD (P-Renstra PD) 2018 - 2023. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Atas dasar hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja yang telah tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Perubahan Rencana Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi P-RENJA PD adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. P-RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis PD. Dengan demikian P-RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen P-RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan P-RENJA PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender.
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa ;
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Master Plan Pengembangan Smart City Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 ;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 ;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Lumajang ;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Komunikasi.

33. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar dalam penyusunan RKA APBD. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada waktu jangka 1 (satu) tahun kedepan serta sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021. Target dan Realisasi dapat di lihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 2.1 T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Lumajang.

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	100	%	11.351.218.412	%	578.371.800	100	%	2.298.549.450	20	%	47.551.300	%	625.923.100	0%	6%		
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1	domain		1	domain	1	domain		1	domain		1	domain	100%			
				264	subdomain	6.631.040.400	264	subdomain	7.843.000	264	subdomain	1.494.921.450	66	subdomain	708.000	264	subdomain	8.551.000	100%	0%

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	1	domain	496.500	1	domain	55.000	1	domain	100.000	1	domain	-		domain	55.000	0%	11%
		Penatalaksan aan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1	domain		1	domain		1	domain		1	domain		1	domain		100 %	
				264	subdom ain	46.869.6 00	264	subdoma in	7.788. 000	66	subdo main	15.576.0 00	66	subdoma in	708.00 0	264	subdom ain	8.496.00 0	100 %	18%
		Penyelenggar aan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah	34	PD	6.583.67 4.300	0	PD	-	9	PD	1.479.24 5.450	0	PD	-		PD	-	0%	0%
		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal	1	pusat data	5.218.40 2.012	1	pusat data	570.52 8.800	1	pusat data	803.628. 000	0	pusat data	46.843. 300	1	pusat data	617.372. 100	100 %	12%

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1	pusat data 1.681.867.932		1	pusat data 489.818.200		1	pusat data 455.188.000	0	pusat data 29.518.300		1	pusat data 519.336.500		100%	31%	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	83	website/aplikasi 871.854.000		44	website/aplikasi 66.400.000		65	website/aplikasi 143.400.000	16	website/aplikasi 17.100.000		60	website/aplikasi 83.500.000		72%	10%	
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peserta pertemuan forum TIK	240	orang 9.930.000		80	orang -		80	orang 201.800.000	20	orang -		100	orang -		42%	0%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	240	orang 29.790.000		80	orang 2.982.600		80	orang 3.240.000	20	orang 225.000		100	orang 3.207.600		42%	11%	
	Meningkatkan Layanan Data dan Statistik Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	32	Data 1.128.356.420		1	Sistem 31.918.700		28	Data 28.683.000	0	Sistem 6.240.000		1	Sistem 38.158.700		3%	3%	

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
		Penyelengga raan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	32	data	1.128.35 6.420	24	data	29.674 .000	28	data	28.683.0 00	7	data	6.240.0 00	31	data	35.914.0 00	97%	3%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul an, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasi kan	32	data	146.758. 780	24	data	814.00 0	28	data	4.683.00 0	7	data	240.00 0	31	data	1.054.00 0	97%	1%
		Membangun Metadada Statistik Sektoral	Jumlah metadada statistik sektoral yang tersedia	32	data	437.727. 640	24	data	28.860 .000	28	data	24.000.0 00	5	data	6.000.0 00	29	data	34.860.0 00	91%	8%
	Meningka tanya Perangkat daerah yang telah menggun akan sandi dalam komunka si Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIA N UNTUK PENGAMAN AN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunaka n sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	%	226.064. 394	80	%	18.000 .000	25	%	51.995.0 00	25	%	-	%	18.000.0 00	0%	8%	

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1	Dokume n 73.738.1 94	1	Dokume n -	3	Dokum en 49.995.0 00	-	Dokume n -		Dokum en -	0%	0%
		Operasionali sasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PD yang memiliki jaring komunikasi sandi	52	PD 73.738.1 94	10	PD -	3	PD 49.995.0 00	3	PD -	6	PD -	12%	0%
		Penyelengga raan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunaka n sandi dalam komunikasi	52	PD 152.326. 200	10	PD 18.000 .000	30	PD 2.000.00 0	0	PD -	10	PD 18.000.0 00	19%	12%
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis	Jumlah PD yang menggunaka n sandi dalam komunikasi radio	52	PD 152.326. 200	10	PD 18.000 .000	30	PD 2.000.00 0	5	PD -	10	PD 18.000.0 00	19%	12%

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Elektronik dan Non Elektronik																	
	Meningka tanya implemen tasi keterbuka an informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKAS I PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembang an pemberdaya an kelompok informasi masyarakat	100	%	12.037.5 09.419	%		25	%	876.564 .000	25	%	-	%	-	0%	0%	
			Persentase diseminasi informasi publik				%					10 0	%	-	%	-	#DI V/0!	#DI V/0!	
				164	KIM				41	KIM	22.960.0 00			-		-	0%	#DI V/0!	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah cakupan dan pengembang an pemberdaya an kelompok informasi masyarakat	205	KIM	12.037.5 09.419	123	KIM	12	PPID	66.480.0 00	20 5	KIM	-	130	KIM	-	63%	0%
			Jumlah konten informasi yang dipublikasik	200 0	konten		501	konten	100	konten	876.564. 000	41 0	konten	157.41 6.800	601	konten	157.416. 800	30%	#DI V/0!

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K
			an																			
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah saluran opini yang dipantau	3	saluran	105.853. 800	3	saluran	27.256 .666	3	saluran	44.720.0 00	3	saluran	11.060. 000	3	saluran	38.316.6 66	100 %	36%		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	270	PPID	394.379. 218	122	ppid	49.646 .980	12	PPID	21.760.0 00	3	ppid	5.380.0 00	125	ppid	55.026.9 80	46%	14%		
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	205	KIM	467.107. 200	123	KIM	43.309 .000	41	KIM	22.960.0 00	10	KIM	5.680.0 00	133	KIM	48.989.0 00	65%	10%		
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	36	agenda	467.107. 200	12	agenda	136.30 2.000	12	agenda	112.080. 000	3	agenda	27.200. 000	15	agenda	163.502. 000	42%	35%		
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	36	laporan	1.565.64 0.592	12	laporan	147.10 0.000	12	laporan	54.000.0 00	3	laporan	9.045.0 00	15	laporan	156.145. 000	42%	10%		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah berita yang dipublikasik an	150 0	berita	3.194.15 0.000	505	berita	347.09 0.380	505	berita	140.800. 000	12 5	berita	10.200. 000	630	berita	357.290. 380	42%	11%		
		Penyelenggar aan	Jumlah partisipasi	150 0	partisipa an	635.520.	505	partisipa n	251.68	500	partisip an	117.580.	12 5	partisipa n	24.851.	630	partisip an	276.533.	42%	44%		

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
		Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	masyarakat dalam dialog interaktif			000			1.671			000			800			471		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis konten infornasi yang dipublikasikan	6	jenis konten	740.321.220	6	Jenis Konten	208.285.000	6	jenis konten	220.080.000	6	Jenis Konten	48.400.000	6	Jenis Konten	256.685.000	100%	35%
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dikelola	6	media	999.994.030	6	media	267.862.666	6	media	142.584.000	6	media	15.600.000	6	media	283.462.666	100%	28%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100	%	13.685.569.143	100	%	4.862.506.293	25	%	4.391.840.329	25	%	560.094.448	100	%	5.422.600.741	100%	40%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	44.398.023	100	%	7.017.000	25	%	8.295.000	25	%	560.000	100	%	7.577.000	100%	17%

No	Sasaran	Program/Ke- giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	4	Jenis 16.158.0 96	4	Jenis 2.304. 000	2	Jenis 2.910.00 0	1	Jenis -	4	Jenis 2.304.00 0	100 %	14%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2	dokume n 8.504.71 4	2	Dokume n 2.119. 000	2	dokum en 2.910.00 0	1	Dokume n 324.00 0	2	Dokum en 2.443.00 0	100 %	29%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2	dokume n 9.111.76 8	2	Dokume n 1.405. 000	2	dokum en 2.475.00 0	0	Dokume n 236.00 0	2	Dokum en 1.641.00 0	100 %	18%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administras i Keuangan Perangkat Daerah	100	% 7.937.14 6.006	100	% 2.558. 841.37 0	25	% 2.752.20 8.709	25	% 415.28 4.277	100	% 2.974.12 5.647	100 %	37%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25	ASN 7.739.59 4.177	25	ASN 2.509. 782.46 5	25	ASN 2.696.51 6.709	25	ASN 406.49 0.277	25	ASN 2.916.27 2.742	100 %	38%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2	fasilitasi 167.063. 949	2	Fasilitasi 47.710 .905	2	fasilita si 55.692.0 00	1	Fasilitasi 8.794.0 00	2	Fasilita si 56.504.9 05	100 %	34%			

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administras i Kepegawaia n PD	100	%	243.235. 786	100	%	1.559. 388.03 0	25	%	859.999. 850	25	%	300.00 0	100	%	1.559.68 8.030	100 %	641 %
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	30	ASN	133.374. 464	30	ASN	1.555. 247.03 0	10	ASN	859.999. 850	10	ASN	300.00 0	30	ASN	1.555.54 7.030	100 %	116 6%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administras i Umum PD	100	%	1.024.89 6.633	100	%	218.87 6.820	25	%	187.644. 370	25	%	34.091. 640	100	%	252.968. 460	100 %	25%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Pener angan yang disediakan	10	jenis	30.044.4 40	10	Jenis	4.586. 340	1	jenis	4.443.33 0	1	Jenis	-	10	Jenis	4.586.34 0	100 %	15%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4	jenis	285.745. 680	4	Jenis	79.543 .900	2	jenis	70.024.1 30	1	Jenis	2.787.8 40	4	Jenis	82.331.7 40	100 %	29%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2	jenis	78.773.9 45	2	Jenis	23.270 .800	1	jenis	23.833.9 10	1	Jenis	300.00 0	2	Jenis	23.570.8 00	100 %	30%
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2	Fasilitasi	601.025. 166	2	Fasilitasi	106,48 4.780	2	Fasilitasi	89.342.0 00	2	Fasilitasi	31.003. 800	2	Fasilitasi	137.488. 580	100 %	23%

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
		SKPD																		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	1.647.53 3.328	100	%	412.08 6.648	25	%	448.580. 400	25	%	83.719. 348	100	%	495.805. 996	100	30%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2	fasilitasi	10.684.6 80	2	Fasilitasi	1.722. 000	2	fasilitasi	4.080.00 0	0	Fasilitasi	588.00 0	2	Fasilitasi	2.310.00 0	100	22%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3	rekening	815.677. 368	3	Rekening	172.17 2.164	3	rekening	195.900. 000	3	Rekening	23.853. 831	3	Rekening	196.025. 995	100	24%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4	fasilitasi	821.171. 280	4	Fasilitasi	238.19 2.484	2	fasilitasi	248.600. 400	2	Fasilitasi	59.277. 517	4	Fasilitasi	297.470. 001	100	36%
		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan n BMD	100	%	824.501. 500	100	%	104.22 6.425	25	%	135.112. 000	25	%	26.139. 183	100	%	130.365. 608	100	16%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional/l apangan yang	4	kendaraan	458.435. 000	4	Jenis	87.976 .425	4	kendaraan	104.822. 000	4	Jenis	24.758. 274	4	Jenis	112.734. 699	100	25%

No	Sasaran	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	1	jenis	22.177.000	1	Jenis	0	1	jenis	7.190.000	1	Jenis	-	1	Jenis	-	100%	0%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	Jenis	133.889.500	3	Jenis	16.250.000	2	Jenis	23.100.000	2	Jenis	1.380.909	3	Jenis	17.630.909	100%	13%

Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa pada Kegiatan Pengelolaan Media Publik Realisasi kinerjanya sebesar 67%, target kinerja 2021 yaitu jumlah media publik yang dikelola 6 media publik, sedangkan Realisasi Capaian Kinerja yang dicapai adalah sebesar 4 media publik, tidak tercapainya target kinerja dikarenakan terjadi kerusakan pada beberapa media publik yang dikelola seperti videotron, maka solusi untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya dan tahun-tahun kedepan adalah dengan melaksanakan perbaikan/pemeliharaan pada media yang rusak.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam P-Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2. TC-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunkasi Dan Informatika
Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9+6)/2	(11)=(7)	(12)=(8)	(13)
1.	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	N/A	N/A	N/A	Baik (2,60- <3,50)	Baik (2,60- <3,50)	Sangat Baik (3,50 -< 4,20)	N/A	2,6 (Cukup)	Baik (2,60- <3,50)	Sangat Baik (3,50 -< 4,20)	
	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	N/A	N/A	N/A	80%	90%	100%	N/A	90,38%	90%	100%	
	Persentase data statistik yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	65%	80%	100%	N/A	100%	80%	100%	
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	90%	95%	100%	N/A	100%	95%	100%	
	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	N/A	N/A	N/A	85%	88%	90%	N/A	99,13%	88%	90%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang antara lain:

Kurang Optimalnya Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)

1. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
2. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat berakibat belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek)
4. Kurang Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Aspirasi Publik
5. Kurangnya Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa
6. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah masih kurang optimal
7. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik dan persandian
8. Belum semua PD yang memiliki database dan aplikasi yang terintegrasi
9. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
10. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.

11. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
12. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
13. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
14. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kehumasan Pemerintah Daerah.
15. Kapasitas SDM yang kurang memadai

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang belum optimal	1.1	Kurang Optimalnya Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)
			1.2	Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio
			1.3	Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat berakibat belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
			1.4	Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek)
			1.5	Kurang Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Aspirasi Publik
			1.6	Kurangnya Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa
			1.7	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah masih kurang optimal
				<i>Urusan Statistik</i>
			1.8	Belum optimalnya penyelenggaraan statistik
			1.9	Belum semua PD memiliki database dan aplikasi terintegrasi
				<i>Urusan Persandian</i>
			1.10	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena ada perubahan SOTK pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4 T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUMAJANG

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp3.111.173.949	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	4.400.840.329	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98%	Rp9.927.180	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98%	13.590.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jenis	Rp3.535.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.420.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp1.819.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.895.000	

NO	RENCANA AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		n Lumajang									
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp864.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.145.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	Rp1.495.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.145.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	Rp2.213.580	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	2.985.000	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	Rp1.775.044.906	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	3.093.318.280	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25 ASN	Rp1.706.331.106	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 Orang/bulan	3.027.429.580	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Informatika Kabupaten Lumajang						ASN			
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitas	Rp59.502.960	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56.712.000	
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitas penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Fasilitas	Rp4.380.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.380.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	Rp2.313.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.660.000	
13						Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1.476.700	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis	Rp2.517.240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Laporan	1.660.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Kabupaten Lumajang						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%	Rp7.130.560	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	98%	9.630.000	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 Dokumen	Rp0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.885.000	
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2 Fasilitasi	Rp7.130.560	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	6.745.000	
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%	Rp59.759.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%	61.654.000	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan	Jumlah jenis pakaian dinas yang	1 Jenis	Rp50.050.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket	33.000.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Informatika Kabupaten Lumajang	disediakan					Kelengkapan			
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian	2 Fasilitas	Rp3.016.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.074.000	
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1 Laporan	Rp1.732.250	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.740.000	
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	3 ASN	Rp4.960.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	9.000.000	
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	10 ASN	Rp0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550 orang	0	
24	Bimbingan Teknis Implementasi	Dinas Komunikasi	Jumlah ASN terfasilitasi	11 ASN	Rp0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	10 orang	14.840.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Peraturan Perundang-Undangan	si dan Informatika Kabupaten Lumajang	Bimtek regulasi kepegawaian			Perundang-Undangan		Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98%	Rp229.205.340	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98%	392.737.649	
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis	Rp4.303.310	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.000.000	
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	Rp74.710.130	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.089.410	
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	Rp23.876.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.872.060	
29	Penyediaan	Dinas	Jumlah jenis	1 Jenis	Rp2.102.100	Penyediaan	Kabupaten	Jumlah Paket	1 Paket	2.102.100	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Bahan/Material	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	bahan lainnya yang disediakan			Bahan/Material	Lumajang	Bahan/Material yang Disediakan			
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi	Rp2.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	4.650.000	
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2 Fasilitasi	Rp121.963.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	237.024.079	
32	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98%	Rp439.859.673	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98%	78.320.000	
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis	Rp439.859.673	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	68.320.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
34	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1 Jenis	Rp0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	5.000.000	
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1 Jenis	Rp0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%	Rp430.547.240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%	451.328.400	
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	2 Fasilitas	Rp2.939.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.228.000	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	Rp179.520.240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	199.500.000	

NO	RENCANA AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Lumajang									
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4 Fasilitasi	Rp248.088.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	248.600.400	
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98%	Rp159.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98%	300.262.000	
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	4 Kendaraan	Rp128.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	171.722.000	
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah alat besar yang dipelihara	1 Jenis	Rp0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kabupaten Lumajang	Jumlah alat besar yang dipelihara	1 unit	7.190.000	
43						Pengadaan Mebel (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	23.000.000	
44	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis	Rp31.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 unit	38.350.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		a Kabupaten Lumajang									
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	1 Jenis	Rp0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	
46	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	100%	Rp2.715.018.201	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Lumajang	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	100%	318.647.665	
47							Kabupaten Lumajang	Persentase Informasi yang dipublikasikan	100%	874.908.000	
48	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	123 KIM	Rp2.715.018.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Kabupaten Lumajang	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik	53 PPID	318.647.665	
49							Kabupaten Lumajang	Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi Publik Milik Pemkab	1200 berita	874.908.000	
50						Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	20.000.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
51	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah saluran opini yang dipantau	3 saluran	Rp35.178.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	48.920.000	
52	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	12 agenda	Rp124.185.600	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	140.000.000	
53	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	6 Jenis Konten	Rp197.500.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	205.000.000	
54	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah media publik yang dikelola	6 media	Rp230.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	74.008.000	
55	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	222 ppid	Rp131.062.580	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	222 Dokumen	63.960.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Lumajang									
56	Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah berita yang dipublikasikan	505 berita	Rp600.000.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Lumajang	Jumlah Layanan Hubungan Media	48 Layanan	300.000.000	
57		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa (DBHCHT)	4 kali	Rp346.685.400						
58	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah	2 unsur	Rp72.000.000	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 dokumen	62.807.665	
59		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	950 peserta	Rp356.399.813						
60	Manajemen Komunikasi Krisis	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	12 laporan	Rp200.009.808	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	12 dokumen	15.000.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		n Lumajang									
61	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	41 KIM	Rp103.037.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 orang	42.960.000	
62	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif, Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	500 partisipan	Rp168.960.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	140.900.000	
63		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	50 komunitas	Rp150.000.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	80.000.000	
64	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	100%	Rp3.686.564.738	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Lumajang	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	100%	2.095.949.450	
65	Pengelolaan Nama Domain yang Telah	Dinas Komunikasi	Jumlah domain dan sub	1 Domain dan 264	Rp2.543.793.138	Pengelolaan Nama Domain yang Telah	Kabupaten Lumajang	Jumlah domain dan sub domain yang	1 Domain	1.203.489.450	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	si dan Informatika Kabupaten Lumajang	domain yang dikelola	Subdomain		Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		dikelola	dan 264 Subdomain		
66	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	1 Domain	Rp100.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	100.000	
67	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp14.160.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96 dokumen	16.992.000	
68	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah	18 Perangkat Daerah	Rp2.529.533.138	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	1.186.397.450	
69	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah website/ aplikasi yang dikelola secara terpadu	1 Pusat Data	Rp1.142.771.600	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal	1 Pusat Data	892.460.000	
70	Penatalaksanaan dan	Dinas	Jumlah	54 Website	Rp19.824.00	Penatalaksanaan dan	Kabupaten	Jumlah Dokumen	0	1.000.000	

NO	RENCANA AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	website/aplikasi yang dipantau		0	Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lumajang	Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
71	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta pertemuan forum TIK	80 Orang	Rp301.800.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	200.000.000	
72	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 Pusat Data	Rp551.697.600	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 Unit	546.560.000	
73						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	10.000.000	
74						Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	12 Dokumen	30.000.000	
75	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	80 Orang	Rp9.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan	27 PD	3.000.000	

NO	RENCANA AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Kabupaten Lumajang						Informasi Elektronik			
76	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	65 website/aplikasi	Rp133.400.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	65 Unit	200.000.000	
77						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Layanan	100.000.000	
78	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah pengguna SPBE yang dibina	370 orang	Rp25.250.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 dokumen	2.700.000	
79	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah Peserta Forum Smart City	80 Orang	Rp101.800.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	100.000	
80	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi TIK	80 Orang	Rp0	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	80 Orang	100.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		n Lumajang									
81						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	6 dokumen	1.500.000	
82	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem	Rp302.112.559	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Lumajang	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	1 Sistem	28.683.000	
83	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	28 Data	Rp302.112.559	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	28 Data	28.683.000	
84	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	28 Data	Rp44.338.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 dokumen	4.283.000	
85	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah SDM yang dibina	80 Orang	Rp102.830.559	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Lumajang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	80 Orang	100.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
		Lumajang									
86	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	28 Data	Rp34.944.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Lumajang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 dokumen	100.000	
87	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah SDM pengelola statistik sektoral sesuai kompetensi	3 Orang	Rp0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	28 Orang	100.000	
88	Pengembangan Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah sarana dan prasarana statistik sektoral	1 Sistem	Rp120.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Lumajang	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	100.000	
89						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah (*)	Kabupaten Lumajang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	150 dokumen	24.000.000	
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	Rp50.556.516	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten Lumajang	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	30.000.000	
91	Penetapan Pola	Dinas	Pola Hubungan	3 jenis	Rp16.490.63	Penetapan Pola	Kabupaten	Pola Hubungan	1	2.200.000	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	pagu indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan		9	Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Lumajang	Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Peraturan		
92	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi	3 jenis	Rp16.490.639	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20 PD	2.200.000	
93	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	30 PD	Rp34.065.878	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	30 PD	27.800.000	
94	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah informasi yang bersandi	375 informasi	Rp34.065.878	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 PD	27.800.000	

Berdasarkan Uraian tabel 2.4 T-C.31, juga mendukung tentang program dan kegiatan yang mengacu pada pengarusutamaan gender Tahun 2022 yang terletak pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, seperti tersaji dalam Tabel 2.5 T.C-32.

Tabel 2.5. T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN LUMAJANG

Nama Perangkat Daerah: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Usulan Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
					PD Pengusul	Mekanisme
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Jaringan Fiber Optik)	Kec. Lumajang		9 titik akses (OPD)	Diskominfo	Forum PD
2	Sinergi terkait validitas data sehingga ada aplikasi/ fitur di website yang bisa digunakan untuk memvalidasi data UMKM di Kabupaten Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang		1 Sistem	DINKOP	Forum PD
3	Validasi data IKM melalui aplikasi agar bisa tersusun secara rapi sehingga data bisa lebih valid sehingga diharapkan ada aplikasi/ fitur di website yang bisa digunakan untuk memvalidasi data terkait hasil Tembakau	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang		1 Sistem	DINDAG	Forum PD
4	Berkolaborasi dengan media cetak/ media elektronik yang ditunjuk oleh Dinas Kominfo.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang		4 Media cetak dan elektronik	DINKES	Forum PD

5	Sinergi dengan Dinas kominfo terkait dengan 4 kegiatan Dewan yang akan dilaksanakan Setwan yaitu : 1. Serap Aspirasi 2. Sosialisasi dari kegiatan Dewan 3. Talk Show, 4. Expose kegiatan DPRD.	LPPL Radio Suara Lumajang - Kec. Lumajang		1 Media	SETWAN	Forum PD
6	Ada blog time/ talkshow/ Iklan Layanan Masyarakat Khusus terkait topik yang berhubungan dengan kesehatan di LPPL Radio Suara Lumajang.	LPPL Radio Suara Lumajang - Kec. Lumajang		1 Media	DINKES	Forum PD

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan inovasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada tahun 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa inovasi yaitu:

1. FOTOMATIS (FOTO PRODUK DAN PROMOSI GRATIS)

a. Latar Belakang

Penyebaran virus corona yang cepat membuat semua orang menjadi was-was untuk keluar rumah dan bersentuhan dengan apapun sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja dari rumah melalui media online guna menghindari kontak langsung dengan lingkungan luar rumahnya. Hal ini yang membuat penjualan produk melalui media online belakangan ini naik secara signifikan. Berbeda dengan belanja langsung di toko, dalam belanja online pada online shop pembeli tidak bertemu. Tapi mereka bebas memilih beraneka macam produk melalui tampilan atau contoh gambar. Sehingga saat ini banyak pelaku bisnis online dan UMKM yang berlomba-lomba untuk menampilkan gambar terbaik dari produknya dengan harapan menarik minat calon pembeli. Sebagian dari mereka bahkan rela mengeluarkan dana ekstra yang tidak sedikit untuk menyewa fotografer handal guna menghasilkan gambar yang menarik karena dalam bisnis online gambar mengambil peran penting dalam laku tidaknya sebuah produk terutama produk yang baru diluncurkan di pasar.

Namun masalah baru muncul bagi pebisnis pemula atau UMKM yang baru saja menggeluti bisnis online yang rata-rata memulai bisnis dengan modal terbatas. Sehingga tentu berat buat mereka untuk menyewa fotografer profesional. Tidak heran jika kondisi ini membuat UMKM sering kali kalah bersaing bukan karena kualitas produk mereka tapi hanya karena foto produk yang di tampilkan tidak menarik. Sehingga UMKM dapat fokus kepada perbaikan mutu dan kualitas produk serta strategi penjualan tanpa harus bersusah payah memikirkan design ataupun display foto produk mereka lagi. Inovasi yang dikembangkan pada awal Tahun 2020 ini merupakan

singkatan dari Foto Produk dan Promosi Gratis, adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat pebisnis online terutama UMKM.

b. Tujuan

Untuk memberikan solusi bagi masyarakat pebisnis online terutama UMKM. Melalui program ini Diskominfo akan membantu UMKM di Kabupaten Lumajang untuk menghasilkan foto produk terbaik yang akan mereka gunakan sebagai display promosi mereka di media online

c. Manfaat

FOTOMATIS yang merupakan singkatan dari Foto Produk dan Promosi Gratis, adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat pebisnis online terutama UMKM. melalui program ini Diskominfo akan membantu UMKM di Kabupaten Lumajang untuk menghasilkan foto produk terbaik yang akan mereka gunakan sebagai display promosi mereka di media online

d. Alur pelaksanaan

Masyarakat pebisnis online terutama UMKM bisa langsung datang ke kantor dinas komunikasi dan informatika sambil membawa sampel produknya untuk di ambil fotonya supaya dihasilkan foto produk terbaik yang akan mereka gunakan sebagai display promosi mereka di media online.

e. Kendala

Dalam praktek pelayanan fotomatis, sering terjadi kesenjangan yang muncul karena asumsi pemohon pelayanan dalam hal ini masyarakat yaitu masih enggan untuk masuk ke lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sehingga membuat masyarakat sungkan untuk menggunakan inovasi ini dengan maksimal.

2. LAPOR LUMAJANG ON AIR

a. Latar Belakang

Setelah sukses menggunakan saluran laporan atau keluhan warga melalui Grup Facebook Lapor Lumajang, kini Dinas Kominfo akan merilis satu inovasi lagi yang berkaitan dengan penyerapan opini dan aspirasi publik. Inovasi baru ini bernama Lapor Lumajang On Air. Nama inovasi ini terbentuk dari gabungan dua frasa yaitu frasa Lapor Lumajang dan frasa On Air. Inovasi yang dikembangkan pada Tahun 2020 ini merupakan sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin membuat sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan.

b. Tujuan

Frasa On Air merujuk kepada kegiatan siaran di udara melalui stasiun radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Kominfo yaitu LPPL RSL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang). Sebagai radio yang melakukan siaran setiap hari, RSL sangat mungkin untuk menyerap opini publik dalam bentuk apapun misalnya laporan atau keluhan. LAPOR LUMAJANG ON AIR bertujuan untuk mempercepat proses tanggapan dari sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan. Selain itu, jangkauan dari laporan ini akan menjadi lebih luas karena segmentasi pendengar RSL bisa berbeda dengan segmentasi pembaca FB Grup Lapor Lumajang

c. Alur pelaksanaan

Frasa Lapor Lumajang merujuk kepada saluran lapor yang sudah dimiliki sebelumnya yang menggunakan platform Facebook Group. Dalam grup ini warga melapor dengan cara menuliskan laporannya di dinding grup Lapor Lumajang untuk kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

d. Kendala

LAPOR LUMAJANG ON AIR merupakan gabungan dari kedua fasilitas pelaporan publik ini. Untuk merealisasikan program ini perlu ada kesepakatan dari dua bidang yang ada di Dinas Kominfo yaitu Bidang Informasi Publik (BIP) dan Bidang Komunikasi Publik (BKP). Setiap laporan yang masuk dalam FB Grup Lapor Lumajang akan menjadi *feed* (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL. Bila memungkinkan, penyiar radio akan langsung menghubungi pejabat yang berwenang untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut. Semua rekaman tanggapan akan disimpan dan di-*publish* di website www.laporlumajang.com untuk dibaca masyarakat.

3. GUINEMA

a. Latar Belakang

Guided News Maker bisa disebut GUINEMA merupakan inovasi untuk membuat berita terpandu. Aplikasi ini diperuntukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang hingga kini masih lemah dalam hal penulisan berita dan berakibat minimnya pasokan berita atau informasi dari KIM. Inovasi yang dikembangkan pada Tahun 2020 ini merupakan singkatan dari *Guided News Maker* adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan menulis dan masih lemah dalam hal penulisan berita terutama untuk KIM.

b. Tujuan

Tujuan aksi perubahan ini dirumuskan menjadi tiga tujuan yaitu: Tujuan Jangka Pendek, Tujuan Jangka Menengah, dan Tujuan Jangka Panjang. KIM adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan jurnalistik atau tulis menulis berita, oleh karena itu perlu sebuah terobosan inovasi untuk mengatasi problem tersebut. Inovasi yang diajukan berbentuk aplikasi yang dinamakan “Guided News Maker” (Guinema) atau pembuat berita terpandu. Dengan aplikasi ini, masalah

ketidakmampuan KIM dalam menulis berita akan teratasi. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, KIM akan bisa membuat berita dengan mudah. aplikasi “Guided News Maker” ini sebagai terobosan inovasi dengan berbagai alasan. Aplikasi ini akan sangat membantu para anggota KIM untuk menulis berita bahkan tanpa kemampuan jurnalistik sekalipun.

c. Manfaat

Aplikasi ini akan memudahkan KIM dalam memproduksi sebanyak-banyaknya informasi tanpa harus merasa kesulitan dalam menyusun berita. Karena banyaknya keluhan yang dihadapi oleh KIM saat membuat berita. Dengan inovasi berupa aplikasi Guided News Maker (GUINEMA), KIM yang awalnya kesulitan dalam membuat berita, kini mereka lebih bisa membuat berita yang bagus baik secara isi, organisasi paragraf, maupun tata bahasa.

d. Alur pelaksanaan

Aplikasi Guinema ini adalah aplikasi dimana pengguna dipandu untuk membuat berita. Dalam aplikasi ini terdapat kerangka berita yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dengan cara menjawab yang sudah dicontohkan serta terdapat icon untuk menambahkan foto sehingga memberikan kesan yang pas. Setelah selesai, maka pengguna akan menerima berita yang sudah jadi dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu melalui aplikasi Guinema tersebut. Aplikasi Guinema log-in melalui email masing-masing, setelah selesai membuat berita maka akan ada pemberitahuan dari email yang berupa berita sudah tersusun rapi.

4. SILANG (INFORMASI KEHILANGAN)

a. Latar Belakang

Radio Suara Lumajang sebagai LPPL menangkap kebutuhan masyarakat atas pelayanan publikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah kebutuhan publikasi berita kehilangan di media massa (radio) sebagai salah satu syarat untuk pengurusan dokumen pribadi yang hilang. Inovasi yang

dikembangkan pada Tahun 2021 ini merupakan singkatan dari Informasi Kehilangan adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menyebarkan informasi kehilangannya ke masyarakat luas dengan harapan dokumen yang hilang bisa ditemukan.

b. Manfaat

Hasil dari Program Pelayanan Informasi Berita Kehilangan ada 2 manfaat, yaitu masyarakat dengan mudah bisa menyebarkan informasi kehilangannya ke masyarakat luas dengan harapan dokumen yang hilang bisa ditemukan, manfaat yang kedua adalah masyarakat bisa memperoleh dokumen bukti siar di radio sebagai syarat untuk mengurus atau membuat dokumen pribadi yang hilang.

c. Alur pelaksanaan

Masyarakat yang ingin melakukan pengurusan dokumen pribadi yang hilang bisa langsung datang ke Radio Suara Lumajang (RSL) sambil mengisi dokumen persyaratan administrasi yang dipersyaratkan supaya bisa memperoleh dokumen bukti siar di radio sebagai syarat untuk mengurus atau membuat dokumen pribadi yang hilang.

d. Kendala

Program Pelayanan Informasi Berita Kehilangan yang merupakan fasilitas pelaporan publik ini selama pelaksanaannya tidak terdapat kendala sama sekali dikarenakan pelayanan ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Setiap laporan yang masuk dalam Pelayanan Informasi Berita Kehilangan akan menjadi *feed* (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam bagian ini, meliputi: (a) Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, (b) Ketahanan Pangan Nasional, dan (c) Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM. Disamping itu, juga memuat prioritas program prioritas dari Nasional antara lain:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Beberapa isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur meliputi : Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi. Guna melaksanakan pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yang berkualitas diperlukan kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil yang didukung kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi; dan tetakelola dan reformasi birokrasi. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Strategi Pembangunan dikategorikan menjadi dua, yaitu: Strategi Umum dan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana bagaimana Visi dan Misi pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Pemersalahan Pelayanan SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.1

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Masih adanya kesenjangan komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat antara provinsi besar dengan provinsi yang masih tertinggal	Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota	Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan professional Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK Belum ada	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Pengembangan muatan e-Governme
2.	Belum meratanya penyebaran teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil	Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation dll.	nt Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4.	Belum siapnya daerah dalam menyusun rencana induk tata kelola TIK	Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK (Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025)	Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	

Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Pada pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat program prioritas dari Provinsi antara lain;

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian

5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

c. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.2
Telaah KLHS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target TPB	Indikator TPB	Data capaian	Strategi pencapaian	Program
Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Capaian 73,96. Belum terpenuhi untuk menjadi 80%	Mengembangkan <i>E-procurement</i> dengan memperluas akses kepada semua Masyarakat	Penyediaan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mengakses <i>E-procurement</i> Peningkatan fasilitas pelayanan <i>E-procurement</i> Penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai <i>E-procurement</i>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target TPB	Indikator TPB	Data capaian	Strategi pencapaian	Program
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	100%, walaupun menurun dari tahun sebelumnya 108,11	1.a Memperluas akses data dan informasi pemerintah kepada masyarakat melalui website 1.b Meningkatkan layanan website agar mudah dikases oleh masyarakat	Penyediaan fasilitas internet yang menjangkau semua wilayah Penyuluhan mengenai website pemerintah Penyuluhan mengenai webdise pemerintah Penyuluhan untuk edukasi masyarakat terkait dengan website pemerintah sebagai media bertukar informasi
	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.		Penambahan jaringan Internet Peningkatan kecepatan jaringan internet Penyediaan fasilitas internet murah	Mempertahankan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ada

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Berikut ini merupakan program prioritas Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022:

1. Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata
2. Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi
3. Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi

Berdasarkan program prioritas Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi Kabupaten Lumajang 2018-2023 dapat mendukung melalui program Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti/ moto Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

B. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta

peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban misi ke tiga, yakni: “**Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.**” Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Tabel T-B.35).

b. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN 2022
Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks SPBE diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB berdasarkan peraturan yang berlaku	Sangat Baik (3,50 -< 4,20)

b. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik
3. Meningkatkan Layanan Data dan Statistik Daerah
4. Meningkatkan Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Indikator, Formula dan Target Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN 2022
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dilingkup Pemerintahan dan Masyarakat</p>	90 %
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia}}{\text{Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan}} \times 100\%$	88 %
Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Bidang data}} \times 100\%$	80 %
Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	95 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah

ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b) Pelayanan Informasi Publik
- c) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- d) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- e) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- f) Manajemen Komunikasi Krisis
- g) Layanan Hubungan Media
- h) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- i) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- j) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- k) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- l) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

- a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan:

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- b) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota:

Dengan Sub Kegiatan:

- a) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- b) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- d) Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- e) Dengan Sub Kegiatan:
- f) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- g) Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- h) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- i) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- j) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- k) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- l) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- m) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- n) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- o) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- p) Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*

- q) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- b) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- c) Membangun Metadata Statistik Sektoral
- d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e) Pengembangan Infrastruktur
- f) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- f) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan/Material
- e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- c) Pengadaan Mebel
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.4 TC-.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							Rp 12.709.266 .831					Rp 7.376.776. 526		-Rp 5.332.490.305					
2.16.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran					Rp 5.009.444. 066			Dinas Kominfo	100%	Rp 3.646.054. 676	DAU / APBD	-Rp 1.363.389.390		100%	4.010.660. 144		
2.16.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					Rp 14.292.180			Dinas Kominfo	98%	Rp 11.274.00 0	DAU / APBD	-Rp 3.018.180		98%	12.401.40 0		
2.16.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Rp 4.170.000								4 Dokumen	4.587.000		
			Penyusunan dokumen renja dan LPPD	1	Dinas Kominfo	7 Jenis	Rp 3.535.200	Penyusunan dokumen renja dan LPPD	1	Dinas Kominfo	4 Dokumen	Rp 4.170.000	DAU / APBD	Rp 634.800					
				2		97 orang/porsi	Rp 4.365.000	Pembelian makanan dan Minuman rapat untuk kegiatan Forum PD	2	Dinas Kominfo		Rp -	DAU / APBD	-Rp 4.365.000					
2.16.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Rp 3.648.000											
			Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni	1	Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 1.819.200	Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni	1	Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 3.648.000	DAU / APBD	Rp 1.828.800		1 Dokumen	4.012.800		
2.16.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Rp -											
			Pelaksanaan penyusunan Dokumen perubahan RKA-skpd; Cetak dan penjiilidan dokumen Perubahan RKA-SKPD; Belanja lembur petugas akuntansi keuangan		Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 864.000	Pelaksanaan penyusunan Dokumen perubahan RKA-skpd; Cetak dan penjiilidan dokumen Perubahan RKA-SKPD; Belanja lembur petugas akuntansi keuangan	1	Dinas Kominfo	2 Dokumen	Rp -	DAU / APBD	-Rp 864.000		2 Dokumen	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.16.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														5 Laporan	0		
			Mecetak dan menggandakan dokumen LAKIP;			1 Dokumen	Rp 1.495.200	Mecetak dan menggandakan dokumen LAKIP;	1	Dinas Kominfo	5 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 1.495.200					
2.16.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														24 Laporan	3.801.600		
			evaluasi penggunaan dana spesifik dan evaluasi dokumen renja		Dinas Kominfo	2 Dokumen	Rp 2.213.580	evaluasi penggunaan dana spesifik dan evaluasi dokumen renja	1	Dinas Kominfo	24 Laporan	Rp 3.456.000	DAU / APBD	Rp 1.242.420					
2.16.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				98%	Rp 2.608.934.958			Dinas Kominfo	98%	2.735.006.536	DAU / APBD	Rp 126.071.578	98%	3.008.507.190			
2.16.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN															0		
			Pelayanan pembayaran gaji pokok	1	Dinas Kominfo	25 ASN	Rp 1.615.148.409	Pelayanan pembayaran gaji pokok	1	Dinas Kominfo	25 Orang/bulan	Rp 1.580.295.050	DAU / APBD	-Rp 34.853.359		25 Orang/bulan	1.738.324.555		
			Pelayanan pembayaran TPP.	2			Rp 929.452.749	Pelayanan pembayaran TPP.	2			Rp 1.096.571.486	DAU / APBD	Rp 167.118.737			1.206.228.635		
2.16.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															63.954.000		
			Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	1			Rp 25.234.260	Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	1			Rp 33.768.000	DAU / APBD	Rp 8.533.740			37.144.800		
			(pembayaran honorarium penatausahaan keuangan)	3	Dinas Kominfo	6 Fasilitas	Rp 16.952.700	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2			Rp 17.844.000	DAU / APBD	Rp 891.300			19.628.400		
			Pelayanan pembayaran lembur PNS	2			Rp 10.404.000	(pembayaran honorarium penatausahaan keuangan)	3			Rp -	DAU / APBD	-Rp 10.404.000			0		
			Pelayanan pembayaran lembur non PNS	4			Rp 6.912.000	Pelayanan pembayaran lembur PNS	4				DAU / APBD	-Rp 6.912.000			0		
								Pelayanan pembayaran lembur non PNS	5			Rp 6.528.000	DAU / APBD	Rp 6.528.000			7.180.800		
2.16.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dinas Kominfo	1 jenis Laporan	Rp 2.313.600	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dinas Kominfo	6 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 2.313.600		6 Laporan	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.16.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
			Menyusun laporan Laporan Keuangan Semesteran	2	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 839.080	Menyusun laporan Laporan Keuangan Semesteran	1	Dinas Kominfo	18 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 839.080		18 Laporan	0		
			Menyusun laporan Laporan Keuangan bulanan	3	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 839.080	Menyusun laporan Laporan Keuangan bulanan	2	Dinas Kominfo	18 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 839.080		18 Laporan	0		
			Menyusun laporan Laporan Keuangan triwulanan	1	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 839.080	Menyusun laporan Laporan Keuangan triwulanan	3	Dinas Kominfo	18 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 839.080		18 Laporan	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Dinas Kominfo	98%	Rp 6.462.700			Dinas Kominfo	98%	-	DAU / APBD	-Rp 6.462.700		98%	0		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Penyusunan dokumen RKBMD		Dinas Kominfo			Penyusunan dokumen RKBMD	1	Dinas Kominfo	2 Dokumen	-	DAU / APBD	Rp -		2 Dokumen	0		
2.16.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Pelayanan administrasi keuangan untuk pengurus barang		Dinas Kominfo	2 Fasilitas	Rp 6.462.700	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Pelayanan administrasi keuangan untuk pengurus barang	1	Dinas Kominfo	12 laporan	-	DAU / APBD	-Rp 6.462.700		12 laporan	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD			Dinas Kominfo	98%	Rp 912.012.000			Dinas Kominfo	98%	Rp 300.000	Rp 300.000	DAU / APBD	-Rp 911.712.000		98%	330.000	
2.16.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Penyediaan pakaian khas Lumajang			1 Jenis	Rp 45.100.000	Penyediaan pakaian khas Lumajang	1	Dinas Kominfo	2 Paket	-	DAU / APBD	-Rp 45.100.000		2 Paket	0		
2.16.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			pengolahan administrasi kepegawaian		Dinas Kominfo	2 Fasilitas	Rp 3.072.000	pengolahan administrasi kepegawaian	1	Dinas Kominfo	12 Dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 3.072.000		12 Dokumen	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Lokasi								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.16.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Dinas Kominfo														
			kontribusi diklat barjas				3 ASN	Rp 3.840.000	kontribusi diklat barjas	1	Dinas Kominfo	3 Orang	-	DAU / APBD	-Rp 3.840.000		3 Orang	0	
2.16.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2															
			Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat			550 Peserta	Rp 860.000.000	Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat	2	11 kecamatan		Rp 300.000	DBHC HT	-Rp 859.700.000		550 orang	330.000		
			Publikasi dan promosi sesuai ketentuan di bidang cukai melalui media massa, perorangan dan kelompok			4 kali		Publikasi dan promosi sesuai ketentuan di bidang cukai melalui media massa, perorangan dan kelompok	1	Kabupaten Lumajang	0 orang	Rp -	DAU / APBD	Rp -			0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD			Dinas Kominfo	98%	Rp 311.925.315			Dinas Kominfo	98%	Rp 295.046.370	DAU / APBD	-Rp 16.878.945		98%	324.551.007		
2.16.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																	
			Pengadaan alat-alat listrik dan elektronik kantor			10 Jenis	Rp 7.385.400	Pengadaan alat-alat listrik dan elektronik kantor	1	Dinas Kominfo	10 Paket	Rp 4.444.330	DAU / APBD	-Rp 2.941.070		10 Paket	4.888.763		
2.16.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																	
			pembelian barang pakai habis alat tulis kantor,	1	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 59.942.410	pembelian barang pakai habis alat tulis kantor,	1	Dinas Kominfo	4 Paket	Rp 61.252.290	DAU / APBD	Rp 1.309.880			67.377.519		
			pembelian barang pakai habis penyediaan materai,	2		1 Jenis	Rp 4.950.000	pembelian barang pakai habis penyediaan materai,	2			-	DAU / APBD	-Rp 4.950.000					0
			pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih	3	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 8.730.260	pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih	3			Rp 8.771.840	DAU / APBD	Rp 41.580				4 Paket	9.649.024
			pembelian barang pakai habis pangan (air minum)	4		1 Jenis	Rp 5.155.370	pembelian barang pakai habis pangan (air minum)	4			-	DAU / APBD	-Rp 5.155.370					0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.16.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											Rp 23.833.910						
			Penyediaan kegiatan pencetakan	1	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 5.996.375	Penyediaan kegiatan pencetakan	1	Dinas Kominfo	2 Paket	Rp 5.430.250		DAU / APBD	-Rp 566.125		2 Paket	5.973.275	
			Penyediaan kegiatan Penggandaan fotokopi	2	Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 18.418.400	Penyediaan kegiatan Penggandaan fotokopi	2	Dinas Kominfo	2 Paket	Rp 18.403.660		DAU / APBD	-Rp 14.740		2 Paket	20.244.026	
2.16.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan											-						
			Pembelian/penyediaan bahan bakar mesin dan pelumas		Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 2.102.100	Pembelian/penyediaan bahan bakar mesin dan pelumas	1	Dinas Kominfo	1 Paket	-		DAU / APBD	-Rp 2.102.100		1 Paket	0	
2.16.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu											Rp 4.950.000						
			Penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu			1 Fasilitasi	Rp 2.250.000	Penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu	1	Dinas Kominfo	1 Laporan	Rp 4.950.000		DAU / APBD	Rp 2.700.000		1 Laporan	5.445.000	
2.16.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											Rp 191.794.000						
			Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	2	Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp 15.970.000	Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	2	Dinas Kominfo	2 Laporan	Rp 11.160.000		DAU / APBD	-Rp 4.810.000		2 Laporan	12.276.000	
			Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	1			Rp 181.025.000	Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	1			Rp 180.634.000		DAU / APBD	-Rp 391.000			198.697.400	
2.16.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD				98%	Rp 358.347.673			Dinas Kominfo	98%	-	-	DAU / APBD	-Rp 358.347.673		98%	0	
2.16.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan											-						
			belanja modal meubelair (meja minimalis ruang kabin, meja receptionist, kursi pejabat eselon II dan III)	8	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 20.521.000	belanja modal meubelair (meja minimalis ruang kabin, meja receptionist, kursi pejabat eselon II dan III)	8	Dinas Kominfo	10 Unit	-		DAU / APBD	-Rp 20.521.000		10 Unit	0	
			Belanja modal penyimpanan perlengkapan kantor	6		1 jenis	Rp 23.000.000	Belanja modal penyimpanan perlengkapan kantor	6			-		DAU / APBD	-Rp 23.000.000			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			(sliding door, filling kabinet, lemari penyimpanan)					(sliding door, filling kabinet, lemari penyimpanan)											
			Belanja modal home use (UPS, Dispenser, Webcam, Splitter)	4		1 jenis	Rp 64.327.000	Belanja modal home use (UPS, Dispenser, Webcam, Splitter)	4			-	DAU / APBD	-Rp 64.327.000			0		
			belanja modal personal komputer/ PC 3 unit, Laptop	2		1 jenis	Rp 99.980.000	belanja modal personal komputer/ PC 3 unit, Laptop	2			-	DAU / APBD	-Rp 99.980.000			0		
			Pengadaan modal peralatan personal komputer (Printer, Scanner)	5		1 jenis	Rp 26.054.880	Pengadaan modal peralatan personal komputer (Printer, Scanner)	5			-	DAU / APBD	-Rp 26.054.880			0		
			Belanja modal Peralatan jaringan	3		1 jenis	Rp 8.000.000	Belanja modal Peralatan jaringan	3			-	DAU / APBD	-Rp 8.000.000			0		
			Belanja modal peralatan studio video dan film	1	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 105.114.713	Belanja modal peralatan studio video dan film	1			-	DAU / APBD	-Rp 105.114.713			0		
			belanja modal alat pendingin (AC)	7	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 11.350.080	belanja modal alat pendingin (AC)	7			-	DAU / APBD	-Rp 11.350.080			0		
2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Dinas Kominfo	98%	Rp 428.269.240			Dinas Kominfo	98%	Rp 431.228.400	Rp 431.228.400	DAU / APBD	Rp 2.959.160	98%	474.351.240		
2.16.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Dinas Kominfo									Rp 6.528.000					
			Penyediaan jasa paket/ pengiriman admin surat menyurat			2 Fasilitasi	Rp 3.457.000	Penyediaan jasa paket/ pengiriman admin surat menyurat		Dinas Kominfo	2 Laporan	-	DAU / APBD	-Rp 3.457.000		2 Laporan	0		
								Lembur				Rp 6.528.000	DAU / APBD	Rp 6.528.000			7.180.800		
2.16.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2										Rp 176.100.000			Rp 193.710.000		
			Pembayaran tagihan telepon		Dinas Kominfo	1 Rekening	Rp 19.110.000	Pembayaran tagihan telepon	2			Rp 18.600.000	DAU / APBD	-Rp 510.000		12 Laporan	20.460.000		
			Pembayaran tagihan air (Radio)			1 Rekening	Rp 624.000	Pembayaran tagihan air (Radio)	3			Rp 900.000	DAU / APBD	Rp 276.000			990.000		
			Pembayaran tagihan listrik kantor utama, Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron			1 Rekening	Rp 158.466.240	Pembayaran tagihan listrik kantor utama, Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron	1	Dinas Kominfo	12 Laporan	Rp 156.600.000	DAU / APBD	-Rp 1.866.240			172.260.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.16.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1									Rp 248.600.400					
			Pembayaran gaji tkb (sekretariat)			1 Fasilitas	Rp 184.800.000	Pembayaran gaji tkb (sekretariat)	1			Rp 184.800.000	DAU / APBD	Rp -		12 Laporan	203.280.000	
			Fasilitasi pembayaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan			1 Fasilitas	Rp 696.000	Fasilitasi pembayaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan	2			-	DAU / APBD	-Rp 696.000			0	
			Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.			1 Fasilitas	Rp 54.120.000	Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.	3	Dinas Kominfo		Rp 56.760.000	DAU / APBD	Rp 2.640.000			62.436.000	
			Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.			1 Fasilitas	Rp 6.396.000	Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.	4			Rp 2.734.800	DAU / APBD	-Rp 3.661.200			3.008.280	
			pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.			1 Fasilitas	Rp 600.000	pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.	5			Rp 900.000	DAU / APBD	Rp 300.000			990.000	
								Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp 3.405.600	DAU / APBD	Rp 3.405.600			3.746.160	
2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD				98%	Rp 369.200.000			Dinas Kominfo	98%	Rp 173.199.370	Rp 173.199.370	DAU / APBD	-Rp 196.000.630		98%	190.519.307
2.16.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5													Rp 157.200.307	
			Pembayaran jasa kir kendaraan operasional atau lapangan			1 kendaraan	Rp 1.000.000	Pembayaran jasa kir kendaraan operasional atau lapangan	5			Rp 300.000	DAU / APBD	-Rp 700.000		4 Unit	330.000	
			Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;			4 Kendaraan	Rp 10.000.000	Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;	3	Dinas Kominfo		Rp 9.872.000	DAU / APBD	-Rp 128.000			10.859.200	
			Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;			14 kendaraan	Rp 4.200.000	Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;	4			Rp 4.200.000	DAU / APBD	Rp -			4.620.000	
			Pembayaran jasa service			1 unit kendaraan	Rp 54.000.000	Pembayaran jasa service	2			Rp 36.000.000	DAU /	-Rp 18.000.000			39.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan			dinas, 3 unit kendaraan operasional		kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan					APBD						
			Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan			4 Kendaraan	Rp 59.400.000	Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan	1			Rp 92.537.370	DAU / APBD	Rp 33.137.370			101.791.107		
2.16.01.2.0 9.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya										Rp 7.190.000							
			Pembayaran jasa pemeliharaan genset			1 jenis	Rp 6.700.000	Pembayaran jasa pemeliharaan genset		Dinas Kominfo	1 unit	7.190.000	DAU / APBD	Rp 490.000		1 unit	7.909.000		
2.16.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1								Rp 23.100.000							
			Pemeliharaan peralatan 18 unit personal computer dan penggantian suku cadang.			1 jenis	Rp 15.400.000	Pemeliharaan peralatan 18 unit personal computer dan penggantian suku cadang.	1			Rp 15.400.000	DAU / APBD	Rp -			16.940.000		
			pemeliharaan peralatan printer/ service printer 10 unit.			1 jenis	Rp 6.500.000	pemeliharaan peralatan printer/ service printer 10 unit.	3	Dinas Kominfo	3 unit	Rp 6.500.000	DAU / APBD	Rp -		3 unit	7.150.000		
			Pemeliharaan pendingin ruangan 20 unit			1 jenis	Rp 12.000.000	Pemeliharaan pendingin ruangan 20 unit	2			Rp 1.200.000	DAU / APBD	-Rp 10.800.000			1.320.000		
2.16.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	
			Pelaksanaan rehab gedung kantor			1 jenis	Rp 200.000.000	Pelaksanaan rehab gedung kantor		Dinas Kominfo	1 Unit	-	DAU / APBD	-Rp 200.000.000		1 Unit	0		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah diperbarui informasi publik				100%	Rp 2.355.642.988				100%	Rp 1.407.287.900	DAU / APBD	-Rp 948.355.088		80%	1.548.016.690		
		Persentase Informasi yang dipublikasikan				100%					100%								
2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID yang telah diperbarui informasi publik				53 PPID	Rp 2.355.642.988				53 PPID	Rp 1.407.287.900	DAU / APBD	-Rp 948.355.088		123 KIM	1.548.016.690		
		Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi Publik Milik Pemkab				410 berita					410 berita								
2.16.02.2.0 1.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik										Rp 44.720.000							
			Memantau opini melalui SP4N Lapor	1	Lumajang	3 saluran	Rp 15.000.000	Memantau opini melalui SP4N Lapor	1	Lumajang	3 dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000		3 dokumen	0		
			Memantau opini melalui Portal Lapor	2	Lumajang		Rp 15.000.000	Memantau opini melalui Portal Lapor	2	Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000			0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Lumajang					Lumajang											
			Memantau opini melalui Group FB Lapor Lumajang	3	Lumajang		Rp 5.178.000	Memantau opini melalui Group FB Lapor Lumajang	3	Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 5.178.000			0		
								Belanja TKB				Rp 42.000.000	DAU / APBD	Rp 42.000.000			46.200.000		
								Belanja Lembur				Rp 2.720.000	DAU / APBD	Rp 2.720.000			2.992.000		
2.16.02.2.0 1.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah											Rp 140.460.000			Rp 154.506.000			
			Belanja Jasa TKB	1	Dinas Kominfo		Rp 106.800.000	Belanja Jasa TKB	1	Dinas Kominfo		Rp 106.800.000	DAU / APBD	Rp -			117.480.000		
			Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka liputan terhadap agenda kegiatan pimpinan dan melaksanakan wawancara kepada narasumber	1	Kabupaten Lumajang	12 agenda	Rp 9.385.600	Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka liputan terhadap agenda kegiatan pimpinan dan melaksanakan wawancara kepada narasumber	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	Rp 33.660.000	DAU / APBD	Rp 24.274.400		12 Dokumen	37.026.000		
			lembur TKB melaksanakan monitoring dan evaluasi liputan komunikasi pemerintah daerah	1	Kabupaten Lumajang	500 liputan	Rp 8.000.000	lembur TKB melaksanakan monitoring dan evaluasi liputan komunikasi pemerintah daerah	1	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 8.000.000			0		
2.16.02.2.0 1.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik											Rp 239.160.000			Rp 263.076.000			
			Belanja Jasa TKB	1	Dinas Kominfo	8 orang	Rp 166.800.000	Belanja Jasa TKB	1	Dinas Kominfo	12 Dokumen	Rp 197.400.000	DAU / APBD	Rp 30.600.000		12 Dokumen	217.140.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Dinas Kominfo		Rp 20.700.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Dinas Kominfo		Rp 41.760.000	DAU / APBD	Rp 21.060.000			45.936.000		
			lembur TKB	1	Dinas Kominfo		Rp 10.000.000	lembur TKB	1	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 10.000.000			0		
2.16.02.2.0 1.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik											Rp 238.980.400			Rp 262.878.440			
			Updating informasi secara berkala	1	Kabupaten Lumajang	6 media	Rp 230.000.000	Updating informasi secara berkala	1	Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 230.000.000		6 Dokumen	0		
			Belanja Jasa TKB	1	Dinas komunikasi dan informatika	2 orang	Rp 47.280.000	Belanja Jasa TKB	1	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 62.400.000	DAU / APBD	Rp 15.120.000			68.640.000		
			Pemeliharaan media luar ruang	1	Kabupaten Lumajang		Rp 85.535.000	Pemeliharaan media luar ruang	1	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 85.535.000			0		
			Pembuatan	1	Kabupaten		Rp	Pembuatan	1	Kabupaten		Rp	DAU	-Rp			39.487.14		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			dan pemasangan media luar ruang		Lumajang		138.655.000	dan pemasangan media luar ruang		Lumajang		35.897.400	/ APBD	102.757.600			0		
			pembayaran pulsa operasional	1	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 5.280.000	pembayaran pulsa operasional	1	Dinas komunikasi dan informatika		-	DAU / APBD	-Rp 5.280.000			0		
								Lembur vidcon				Rp 10.362.000	DAU / APBD	Rp 10.362.000	untuk memberikan tambahan upah kepada tim vidcon yang bekerja di luar jam kerja		11.398.200		
								Pembuatan Video				Rp 100.000.000	DAU / APBD	Rp 100.000.000	untuk biaya pembuatan video publikasi potensi daerah		110.000.000		
								Pemeliharaan Studio dan Film (kamera dan drone)				Rp 18.000.000	DAU / APBD	Rp 18.000.000	pemeliharaan atau perawatan kamera sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja petugas peliput giat pimpinan		19.800.000		
								Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Peliputan dan Dokumentasi				Rp 12.321.000	DAU / APBD	Rp 12.321.000	untuk memberikan identitas Tenaga Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan di Lapangan		13.553.100		
2.16.02.2.0 1.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik										Rp 31.038.500					Rp 34.142.350		
			Melakukan pembinaan dan pemberian materi peningkatan kapasitas PPID Pembantu	1	Peningkatan kapasitas PPID Pembantu dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundangi PPID terkait.	71 PPID PEMBANTU	Rp 43.687.527	Belanja Jasa TKB	1	Peningkatan kapasitas PPID Pembantu dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundangi PPID terkait.	1 dokumen	Rp 20.400.000	DAU / APBD	-Rp 23.287.527			22.440.000		
			Melakukan pembinaan dan pemberian materi peningkatan kapasitas PPID Desa	2	Peningkatan kapasitas PPID Desa dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundangi PPID terkait. Money PPID Desa dilaksanakan pada desa yang telah	151 PPID DESA	Rp 87.375.053	Lembur Penyusunan laporan peningkatan kapasitas PPID Pembantu, PPID Desa dan menyelesaikan tugas tambahan	2	Peningkatan kapasitas PPID Desa dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundangi PPID terkait. Money PPID Desa dilaksanakan pada desa yang telah	1 dokumen	Rp 1.360.000	DAU / APBD	-Rp 86.015.053		1 dokumen	1.496.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					memiliki SK PPID Desa.					memiliki SK PPID Desa.									
								Peningkatan kapasitas PPID Pembantu				Rp 8.528.500	DAU / APBD	Rp 8.528.500			9.381.350		
								Rakor PPID				Rp 750.000	DAU / APBD	Rp 750.000	mohon ditambahkan keterangan/a lasan munculnya aktifitas ini di kolom catatan penting		825.000		
2.16.02.2.0 1.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media											Rp 450.954.000	Rp 496.049.400					
			Belanja jasa TKB	1	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 40.800.000	Belanja jasa TKB	1			Rp 40.800.000	DAU / APBD	Rp -			44.880.000		
			kerjasama promosi dengan media online	1	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 100.000.000	kerjasama promosi dengan media online	1			50.000.000	DAU / APBD	-Rp 50.000.000			55.000.000		
			kerjasama promosi dengan media cetak	1	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 159.200.000	kerjasama promosi dengan media cetak	1			-	DAU / APBD	-Rp 159.200.000			0		
			Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (radio dan televisi)	1	Dinas komunikasi dan informatika		Rp 300.000.000	Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (radio dan televisi)	1	23 Layanan		-	DAU / APBD	-Rp 300.000.000			0		
								Honor PPTK				2.154.000	DAU / APBD	Rp 2.154.000	memberikan insentif pada PPTK untuk kelancaran tugas		2.369.400		
								Kerjasama Publikasi dengan Media Massa				Rp 358.000.000	DAU / APBD	Rp 358.000.000	mengoptimalkan diseminasi informasi pembangunan daerah (33 media cetak, 25 media online, 5 media elektronik TV dan radio)		393.800.000		
2.16.02.2.0 1.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan											Rp -						
			Pembuatan pertunjukan rakyat untuk sosialisasi program Pemerintah	1	Kecamatan Lumajang	2 unsur: 1. Kelompok Pertura, 2. Kelompok Pembuat Konten	Rp 50.000.000	Pembuatan pertunjukan rakyat untuk sosialisasi program Pemerintah	1	Kecamatan Lumajang	2 dokumen	Rp -	DAU / APBD	-Rp 50.000.000		2 dokumen	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pembuatan konten positif Iklan Layanan Masyarakat tentang program Pemerintah	2	Kecamatan Lumajang	Positif	Rp 22.000.000	Pembuatan konten positif Iklan Layanan Masyarakat tentang program Pemerintah	2	Kecamatan Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 22.000.000			0		
2.16.02.2.0 1.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis											Rp 108.000.000			Rp 118.800.000			
			Melaksanakan pers rilis terkait isu terindikasi krisis		Kabupaten Lumajang	12 laporan	Rp 200.009.808	Melaksanakan pers rilis terkait isu terindikasi krisis		Kabupaten Lumajang	12 dokumen	Rp 108.000.000	DAU / APBD	-Rp 92.009.808		12 dokumen	118.800.000		
2.16.02.2.0 1.10	Penguatan kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya											Rp 36.395.000			Rp 40.034.500			
			Melakukan pembinaan KIM Desa di tiap-tiap kecamatan	1	Dilaksanakan di 7 kecamatan se Kabupaten Lumajang: PASIRIAN, LUMAJANG, GUCIALIT, PADANG, RANDUAGUNG, SUMBERSU KO, dan YOSOWILAN GUN		Rp 103.037.000	Belanja Jasa TKB	1	Dilaksanakan di 7 kecamatan se Kabupaten Lumajang: PASIRIAN, LUMAJANG, GUCIALIT, PADANG, RANDUAGUNG, SUMBERSU KO, dan YOSOWILAN GUN		Rp 21.600.000	DAU / APBD	-Rp 81.437.000			23.760.000		
			Kampanye nasional terkait stunting	2	Kabupaten Lumajang: PASIRIAN, LUMAJANG, GUCIALIT, PADANG, RANDUAGUNG, SUMBERSU KO, dan YOSOWILAN GUN	41 KIM	Rp 103.037.000	Belanja Lembur Persiapan dan menyiapkan laporan pembinaan KIM perkecamatan dan menyelesaikan tugas tambahan	2	Kabupaten Lumajang: PASIRIAN, LUMAJANG, GUCIALIT, PADANG, RANDUAGUNG, SUMBERSU KO, dan YOSOWILAN GUN	60 orang	Rp 1.360.000	DAU / APBD	Rp 1.360.000		60 orang	1.496.000		
								Honor PPTK	7			Rp 900.000	DAU / APBD	Rp 900.000	PPTK sebagai Penanggungjawab kegiatan		990.000		
								Pembinaan KIM melalui Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita	3			Rp 6.400.000	DAU / APBD	Rp 6.400.000	Meningkatkan kemampuan Tim penyusunan dokumen guna melestarikan informasi tentang sejarah desa		7.040.000		
								Penyusunan Dokumen Juklak KIM Desa Bercerita	4			Rp 1.185.000	DAU / APBD	Rp 1.185.000	Sebagai panduan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Desa Bercerita		1.303.500		
								Koordinasi Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita	5			Rp 3.750.000	DAU / APBD	Rp 3.750.000	Sebagai wadah penghubung aspirasi dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien		4.125.000		
								Money Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita	6			Rp 1.200.000	DAU / APBD	Rp 1.200.000	Memastikan proses kegiatan Desa Bercerita sudah sesuai dengan		1.320.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
															pedoman dan perencanaan				
2.16.02.2.0 1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan											Rp 117.580.000				Rp 129.338.000		
			Siaran radio dialog interaktif dengan masyarakat	1	Kabupaten Lumajang		Rp 168.960.000	Siaran radio dialog interaktif dengan masyarakat	1	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 168.960.000			0		
			Belanja makan minum penambah daya tahan tubuh	1	Kabupaten Lumajang		Rp 9.000.000	Belanja makan minum penambah daya tahan tubuh	3	Kabupaten Lumajang		Rp 4.940.000	DAU / APBD	-Rp 4.060.000			5.434.000		
			Pemeliharaan antena dan pemancar radio	1	Kabupaten Lumajang		Rp 40.000.000	Pemeliharaan antena dan pemancar radio	1	Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 40.000.000			0		
			pembelian paket data dan streaming	1	Kabupaten Lumajang		Rp 13.920.000	pembelian paket data dan streaming	1	Kabupaten Lumajang			DAU / APBD	-Rp 13.920.000			69.960.000		
			belanja makan minum untuk dialog interaktif	1	Kabupaten Lumajang		Rp 10.000.000	belanja makan minum untuk dialog interaktif	4	LPPL		Rp 6.480.000	DAU / APBD	-Rp 3.520.000			#REF!		
			Honorarium Narasumber RSL0TW dalam kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1	Kabupaten Lumajang	500 partisipan	Rp 15.000.000	Honorarium Narasumber RSL0TW dalam kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000		12 Dokumen	7.128.000		
			Pembayaran ljin penggunaan spektrum frekuensi Radio	1	LPPL		Rp 6.000.000	Pembayaran ljin penggunaan spektrum frekuensi Radio	5	Kabupaten Lumajang		Rp 3.000.000	DAU / APBD	-Rp 3.000.000			#REF!		
			Belanja makanan dan Minuman dalam rangka kegiatan kegiatan RSL0TW	1	Kabupaten Lumajang		Rp 3.000.000	Belanja makanan dan Minuman dalam rangka kegiatan kegiatan RSL0TW		Kabupaten Lumajang			DAU / APBD	-Rp 3.000.000			3.300.000		
			Pelaksanaan aktivitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1	Kabupaten Lumajang		Rp 4.040.000	Pelaksanaan aktivitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Kabupaten Lumajang			DAU / APBD	-Rp 4.040.000			1.540.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terkait Mitigasi Bencana, melalui RSL	2	Radio suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang			memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terkait Mitigasi Bencana, melalui RSL		Radio suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	Rp -			0		
			Siaran radio dialog interaktif dengan komunitas	2	Radio suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang			Siaran radio dialog interaktif dengan komunitas		Radio suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang		-	DAU / APBD	Rp -			0		
			Honor Host komunitas dan tenaga penyiari Freelance	1	Radio suara Lumajang	50 komunitas	Rp 74.000.000	Honor Host komunitas dan tenaga penyiari Freelance	1	Radio suara Lumajang		Rp 20.160.000	DAU / APBD	-Rp 53.840.000			#REF!		
			Pembayaran narasumber RSL0TW	2			Rp 10.000.000	Pembayaran narasumber RSL0TW		Radio suara Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 10.000.000			0		
			Menyelenggarakan kegiatan humas, dengan tema "wadul Cak Touriq" dengan melibatkan ka OPD dan masyarakat terkait	3	Kabupaten Lumajang		Rp 27.000.000	Menyelenggarakan kegiatan humas, dengan tema "wadul Cak Touriq" dengan melibatkan ka OPD dan masyarakat terkait		Radio suara Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 27.000.000			22.176.000		
			Pembayaran Lembur	3	Kabupaten Lumajang		Rp 5.000.000	Pembayaran Lembur		Radio suara Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 5.000.000			0		
								Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1	Kabupaten Lumajang		Rp 18.000.000	DAU / APBD	Rp 18.000.000			19.800.000		
								Belanja TKB Radio	1	Kabupaten Lumajang		Rp 63.600.000	DAU / APBD	Rp 63.600.000					
								Pembayaran Izin Hak Penyiarian LPPL Radio Suara Lumajang	2	Kabupaten Lumajang		Rp 1.400.000	DAU / APBD	Rp 1.400.000					
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.					Rp 4.932.809.738				100%	Rp 2.287.537.450	DAU / APBD	-Rp 2.645.272.288		100%	2.516.291.195		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola				1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 3.669.358.759				1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 1.494.921.450	DAU / APBD	-Rp 2.174.437.309		1 Domain dan 264 Subdomain	1.644.413.595		
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota										Rp 100.000							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id	1	Dinas Kominfo	1 Domain	Rp 100.000	Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id	1	Dinas Kominfo	1 Domain	Rp 100.000	DAU / APBD	Rp -		1 Domain	110.000		
2.16.03.2.0 1.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											Rp 15.576.000						
			Monitoring Domain dan Subdomain	1	Dinas Kominfo	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 14.160.000	Monitoring Domain dan Subdomain	1	Dinas Kominfo	96 dokumen	Rp 15.576.000	DAU / APBD	Rp 1.416.000		96 dokumen	17.133.600		
2.16.03.2.0 1.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah											Rp 1.479.245.450						
			Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Dinas Kominfo dan OPD Terkait (1. BLPBKJ, 2. BAPPEDA, 3. BAGIAN UMUM, 4. BPKD, 5. KANTOR BUPATI, 6. DINKES, 7. DISARPUS, 8. PENDOPO BUPATI, 9. BPRD)	9 Titik	Rp 1.573.241.759	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Dinas Kominfo dan OPD Terkait (1. BLPBKJ, 2. BAPPEDA, 3. BAGIAN UMUM, 4. BPKD, 5. KANTOR BUPATI, 6. DINKES, 7. DISARPUS, 8. PENDOPO BUPATI, 9. BPRD)	1 unit	Rp 1.187.173.450	DAU / APBD	-Rp 386.068.309		1 unit	1.305.890.795		
			Pengadaan As Number dan IP Address Internet	2	Dinas Kominfo		Rp 20.000.000	Pengadaan As Number dan IP Address Internet	2	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 20.000.000			0		
			Pengadaan Perangkat Penunjang Pusat Data (Data Center)	3	Dinas Kominfo		Rp 500.000.000	Pengadaan Perangkat Penunjang Pusat Data (Data Center)	3	Dinas Kominfo		Rp 179.960.000	DAU / APBD	-Rp 320.040.000			197.956.000		
			Pengadaan Perangkat Firewall	4	Dinas Kominfo		Rp 112.112.000	Pengadaan Perangkat Firewall	4	Dinas Kominfo		Rp 112.112.000	DAU / APBD	Rp -			123.323.200		
			Pengadaan Perangkat APAR	5	Dinas Kominfo		Rp 200.000.000	Pengadaan Perangkat APAR	5	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 200.000.000			0		
			Pengadaan Lisensi zoom meeting	6	Dinas Kominfo		Rp 3.500.000	Pengadaan Lisensi zoom meeting	6	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 3.500.000			0		
			Pengadaan perangkat command center	7	ruang command center		Rp 1.246.245.000	Pengadaan perangkat command center	7	ruang command center		-	DAU / APBD	-Rp 1.246.245.000			0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Aktivitas	Skala Prioritas	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemerataan ketersediaan akses internet	8	Dinas Kominfo				8	Dinas Kominfo							
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal					Rp 1.263.450.979				1 Pusat Data	Rp 792.616.000	Rp 792.616.000	DAU / APBD	-Rp 470.834.979		871.877.600
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik											Rp 201.800.000				
			Penyusunan Arsitektur SPBE	1	Dinas Kominfo	1 dokumen	Rp 200.000.000	Penyusunan Arsitektur SPBE	1	Dinas Kominfo	1 dokumen	Rp 200.000.000		DAU / APBD	Rp -	1 dokumen	220.000.000
			mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE	2	Dinas Kominfo	120 orang	Rp 1.800.000	mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE	2	Dinas Kominfo		Rp 1.800.000		DAU / APBD	Rp -		1.980.000
			Mengadakan rapat koordinasi	1	Dinas Kominfo	480 orang	Rp 7.200.000	Mengadakan rapat koordinasi	1	Dinas Kominfo		-		DAU / APBD	-Rp 7.200.000		0
			Pemberian rekomendasi teknis pembuatan aplikasi di perangkat daerah	2	Dinas Kominfo	120 orang	Rp 1.800.000	Pemberian rekomendasi teknis pembuatan aplikasi di perangkat daerah	2	Dinas Kominfo		-		DAU / APBD	-Rp 1.800.000		0
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola											Rp 464.916.000				Rp 511.407.600
			pembayaran upah pegawai analisis sistem informasi dan jaringan & teknis jaringan instalasi	1	Dinas Kominfo	1 Pusat Data	Rp 44.400.000	pembayaran upah pegawai analisis sistem informasi dan jaringan & teknis jaringan instalasi	1	Dinas Kominfo	1 Unit	Rp 44.400.000		DAU / APBD	Rp -	1 Unit	48.840.000
			Pembayaran Bandwidth data center	2	Dinas Kominfo		Rp 325.463.000	Pembayaran Bandwidth data center	2	Dinas Kominfo		Rp 386.760.000		DAU / APBD	Rp 61.297.000		425.436.000
			Pembayaran Bandwidth DRC	3	Dinas Kominfo		Rp 151.800.000	Pembayaran Bandwidth DRC	3	Dinas Kominfo		-		DAU / APBD	-Rp 151.800.000		0
			Pembayaran lisensi control panel	4	Dinas Kominfo		Rp 17.000.000	Pembayaran lisensi control panel	4	Dinas Kominfo		Rp 16.500.000		DAU / APBD	-Rp 500.000		18.150.000
			Pembayaran SSL Comodo Positiv Wildcard SSL	5	Dinas Kominfo		Rp 2.500.000	Pembayaran SSL Comodo Positiv Wildcard SSL	5	Dinas Kominfo		Rp 2.500.000		DAU / APBD	Rp -		2.750.000
			Pembayaran Paket SMS Nadine	6	Dinas Kominfo		Rp 72.000.000	Pembayaran Paket SMS Nadine	6	Dinas Kominfo		-		DAU / APBD	-Rp 72.000.000		0
			Pembayaran Jaringan Komputer	7	Dinas Kominfo		Rp 41.413.979	Pembayaran Jaringan Komputer	7	Dinas Kominfo		-		DAU / APBD	-Rp 41.413.979		0
			Pembayaran Paket SMS	8	Dinas Kominfo		Rp 18.000.000	Pembayaran Paket SMS	8	Dinas Kominfo		-		DAU /	-Rp 18.000.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Broadcast					Broadcast					APBD						
								Pemeliharaan Jaringan				Rp 9.728.000	DAU / APBD	Rp 9.728.000	pemeliharaan diperlukan karena beberapa perangkat jaringan pada data center sudah tidak dapat bekerja secara optimal sebagai akibat dari seringnya listrik padam dan genset tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan layanan data center terganggu bahkan tidak dapat beroperasi.		10.700.800		
								Honorarium PPTK				Rp 5.028.000	DAU / APBD	Rp 5.028.000			5.530.800		
2.16.03.2.0 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik											Rp 7.500.000						
			Mengadakan Rapat Koordinasi terkait data dan informasi elektronik	1	Dinas Kominfo	720 orang	Rp 10.800.000	Mengadakan Rapat Koordinasi terkait data dan informasi elektronik	1	Dinas Kominfo	27 PD	Rp 7.500.000	DAU / APBD	-Rp 3.300.000		27 PD	8.250.000		
2.16.03.2.0 2.09	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan											Rp 118.400.000						
			Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web	1	Dinas Kominfo	62 website/aplikasi	Rp 68.400.000	Pembayaran upah pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web	1	Dinas Kominfo		Rp 68.400.000	DAU / APBD	Rp -			75.240.000		
			Pendampingan Implementasi TTE	2	Dinas Kominfo	1 paket	Rp 50.000.000	Pendampingan Implementasi TTE	2	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 50.000.000			0		
			Pendampingan GRMS	3	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 120.000.000	Pendampingan GRMS	3	Dinas Kominfo	62 Unit	-	DAU / APBD	-Rp 120.000.000		62 Unit	0		
			Pendampingan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)	4	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 50.000.000	Pendampingan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Secara Elektronik (NADINE)	4	Dinas Kominfo		Rp 50.000.000	DAU / APBD	Rp -			55.000.000		
			Pengembangan aplikasi Lumajang Bersahabat	5	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 15.000.000	Pengembangan aplikasi Lumajang Bersahabat	5	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 15.000.000			0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Monitoring Website/Aplikasi yang dikelola secara optimal		Dinas Kominfo	75 Website	Rp 19.824.000	Monitoring Website/Aplikasi yang dikelola secara optimal		Dinas Kominfo	0 dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 19.824.000		0 dokumen	0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
			Menyelenggarakan sosialisasi Implementasi TTE	1	Dinas Kominfo	60 orang	Rp 8.550.000	Menyelenggarakan sosialisasi Implementasi TTE	1	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 8.550.000			0		
			Mengadakan bimtek Perangkat Website daerah/unit kerja/keurahan	2	Dinas Kominfo	140 orang	Rp 6.500.000	Mengadakan bimtek Perangkat Website daerah/unit kerja/keurahan	2	Dinas Kominfo	1 dokumen	-	DAU / APBD	-Rp 6.500.000		1 dokumen	0		
			Mengadakan bimtek Nadine	3	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 3.800.000	Mengadakan bimtek Nadine	3	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 3.800.000			0		
			Mengadakan bimtek Website desa	4	Dinas Kominfo	240 orang	Rp 27.200.000	Mengadakan bimtek Website desa	4	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 27.200.000			0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City																	
			Belanja konsultasi pendampingan Smart City	1	Dinas Kominfo		Rp -												
			Mengadakan rapat koordinasi	2	Dinas Kominfo														
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												DAU / APBD	Rp -			0		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi				1 sistem	Rp 312.602.000				80 %	Rp 28.683.000	DAU / APBD	-Rp 283.919.000		1 Sistem	31.551.300		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi				28 data	Rp 312.602.000				28 Data	Rp 28.683.000	DAU / APBD	-Rp 283.919.000		28 Data	31.551.300		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral															Rp 4.683.000		
			Menyusun laporan bulanan, semester dan	1	Dinas Kominfo	28 Data	Rp 10.318.000	Menyusun laporan bulanan, semester dan	1	Dinas Kominfo	12 dokumen	Rp 363.000	DAU / APBD	-Rp 9.955.000		12 dokumen	399.300		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo					tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo											
			Menyusun buku saku data statistik sektoral kabupaten	2	Dinas Kominfo	200 eks	Rp 24.420.000	Menyusun buku saku data statistik sektoral kabupaten	2	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 24.420.000			0		
			Melaksanakan move data	3	Seluruh perangkat daerah	21 Kecamatan	Rp 9.600.000	Melaksanakan move data	3	Seluruh perangkat daerah		-	DAU / APBD	-Rp 9.600.000			0		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Kantor Data Statistik Sektoral				Rp 4.320.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Kantor Data Statistik Sektoral	4			Rp 4.320.000	DAU / APBD	Rp -	Aktivitas sudah muncul di renja murni		4.752.000		
2.20.02.2.0 1.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi											-						
			Pendampingan manajemen data (DMBOOK)	1	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 100.000.000	Pendampingan manajemen data (DMBOOK)	1	Dinas Kominfo	80 Orang	-	DAU / APBD	-Rp 100.000.000		80 Orang	0		
			Melaksanakan rapat koordinasi	2	Dinas Kominfo		Rp 9.000.000	Melaksanakan rapat koordinasi	2	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 9.000.000			0		
2.20.02.2.0 1.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun											Rp 24.000.000						
			Pembayaran upah pegawai analisis statistik	1	Dinas Kominfo	28 Data	Rp 24.000.000	Pembayaran upah pegawai analisis statistik	1	Dinas Kominfo	28 Dokumen	Rp 24.000.000	DAU / APBD	Rp -		28 Dokumen	26.400.000		
			Pengolahan data statistik sektoral	2	Dinas Kominfo		Rp 10.944.000	Pengolahan data statistik sektoral	2	Dinas Kominfo		-	DAU / APBD	-Rp 10.944.000			0		
2.20.02.2.0 1.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik											-						
			Pembayaran berlangganan aplikasi monev dan pelaporan analisis media online		Dinas Kominfo	1 Sistem	Rp 120.000.000	Pembayaran berlangganan aplikasi monev dan pelaporan analisis media online	1	Dinas Kominfo	1 Unit	-	DAU / APBD	-Rp 120.000.000		1 Unit	0		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				100%	Rp 98.768.039			Dinas Kominfo	100%	Rp 7.213.500	DAU / APBD	-Rp 91.554.539		100%	7.934.850		
2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi radio				100%	Rp 47.277.400			Dinas Kominfo	100%	Rp 7.213.500	DAU / APBD	-Rp 40.063.900		100%	7.934.850		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.21.02.2.0 1.04	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											Rp 7.213.500	Rp 7.934.850					
			sosialisasi jaringan komunikasi sandi terhadap PD	1		30 PD	Rp 22.277.400	sosialisasi literasi keamanan informasi elektronik dan non elektronik	1	Dinas Kominfo	1 Laporan	Rp 7.213.500	DAU / APBD	-Rp 15.063.900		1 Laporan	7.934.850		
			Ijin Frekuensi persandian	2		1 paket	Rp 25.000.000	Ijin Frekuensi persandian	2	Dinas Kominfo	1 paket	Rp -	DAU / APBD	-Rp 25.000.000		1 paket	0		
2.21.02.2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan				100%	Rp 51.490.639			Dinas Kominfo	100%	-	DAU / APBD	-Rp 51.490.639		100%	0		
2.21.02.2.0 2.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi											-						
			Mengelola jaringan komunikasi sandi pusat	1	Lumajang	20 PD	Rp -		1	Lumajang		-	DAU / APBD	Rp -			0		
			Mengelola jaringan komunikasi sandi Provinsi	2	Lumajang		Rp -		2	Lumajang	20 PD	-	DAU / APBD	Rp -		20 PD	0		
			Mengelola jaringan komunikasi sandi Kabupaten	3	Lumajang		Rp 16.490.639	Mengelola jaringan komunikasi sandi Kabupaten	3	Lumajang		-	DAU / APBD	-Rp 16.490.639			0		
			Sewa Lahan Bangunan Menara Telekomunikasi	4	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit lahan	Rp 9.000.000	Sewa Lahan Bangunan Menara Telekomunikasi	4	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit lahan	-	DAU / APBD	-Rp 9.000.000		2 unit lahan	0		
			Pemeliharaan Bangunan Menara Telekomunikasi	5	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit menara	Rp 14.000.000	Pemeliharaan Bangunan Menara Telekomunikasi	5	Gucialit dan Yosowilangun	2 unit menara	-	DAU / APBD	-Rp 14.000.000		2 unit menara	0		
			Pemeliharaan Perangkat komunikasi	6	Gucialit dan Yosowilangun		Rp 12.000.000	Pemeliharaan Perangkat komunikasi	6	Gucialit dan Yosowilangun		-	DAU / APBD	-Rp 12.000.000			0		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1

Program Utama dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/ dihasilkan dari Perubahan Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
Tahun 2022

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi Publik Milik Pemkab <p>Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik Persentase Informasi yang dipublikasikan 	<p>53 KIM</p> <p>1200 berita</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	<p>Output:</p> <p>Jumlah domain dan sub domain yang dikelola</p> <p>Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal</p> <p>Outcomes</p> <p>Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.</p>	<p>1 Domain dan 264 Subdomain</p> <p>1 Pusat Data</p> <p>100%</p>
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	<p>Output:</p> <p>Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi</p> <p>Outcomes</p> <p>Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi</p>	<p>28 Data</p> <p>80%</p>

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan 2. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi <p>Outcomes</p> <p>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</p>	<p>1 Peraturan</p> <p>49 PD</p> <p>90%</p>
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2. Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah 4. Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD 5. Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD 6. Persentase fasilitasi pengadaan BMD 7. Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor 8. Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD <p>Outcomes</p> <p>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</p>	<p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p> <p>98%</p>

4.3 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022

direncanakan sebesar **Rp7.376.776.526,-** dengan seluruhnya digunakan untuk Belanja Langsung.

Tabel 4.3 Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp 3.646.054.676	DAU / APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98%	Rp 11.274.000	DAU / APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp 4.170.000	
		4 Dokumen	Rp 4.170.000	DAU / APBD
			Rp -	DAU / APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp 3.648.000	
		1 Dokumen	Rp 3.648.000	DAU / APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp -	
		2 Dokumen	Rp -	DAU / APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	
		5 Laporan	-	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 3.456.000	
		24 Laporan	Rp 3.456.000	DAU / APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	2.735.006.536	DAU / APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 2.676.866.536	
		25 Orang/bulan	Rp 1.580.295.050	DAU / APBD
			Rp 1.096.571.486	DAU / APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp 58.140.000	
		12 Dokumen	Rp 33.768.000	DAU / APBD
			Rp 17.844.000	DAU / APBD
			Rp -	DAU / APBD
				DAU / APBD
			Rp 6.528.000	DAU / APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	
		6 Laporan	-	DAU / APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	
		18 Laporan	-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98%	-	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	
		2 Dokumen	-	DAU / APBD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	
		12 laporan	-	DAU / APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	98%	Rp 300.000	Rp 300.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	
		2 Paket	-	DAU / APBD
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	
		12 Dokumen	-	DAU / APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	
		3 Orang	-	DAU / APBD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp 300.000	
		0 orang	Rp 300.000	DBHCHT
			Rp -	DAU / APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	98%	Rp 295.046.370	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Rp 4.444.330	
		10 Paket	Rp 4.444.330	DAU / APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Rp 70.024.130	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
		4 Paket	Rp 61.252.290	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 8.771.840	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Rp 23.833.910	
		2 Paket	Rp 5.430.250	DAU / APBD
			Rp 18.403.660	DAU / APBD
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	
		1 Paket	-	DAU / APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp 4.950.000	
		1 Laporan	Rp 4.950.000	DAU / APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 191.794.000	
		2 Laporan	Rp 11.160.000	DAU / APBD
			Rp 180.634.000	DAU / APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98%	-	DAU / APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	
		10 Unit	-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			-	DAU / APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%	Rp 431.228.400	DAU / APBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp 6.528.000	
		2 Laporan	-	DAU / APBD
			Rp 6.528.000	DAU / APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Rp 176.100.000	
		12 Laporan	Rp 18.600.000	DAU / APBD
			Rp 900.000	DAU / APBD
			Rp 156.600.000	DAU / APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Rp 248.600.400	
		12 Laporan	Rp 184.800.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 56.760.000	DAU / APBD
			Rp 2.734.800	DAU / APBD
			Rp 900.000	DAU / APBD
			Rp 3.405.600	DAU / APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98%	Rp 173.199.370	DAU / APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rp 142.909.370	
		4 Unit	Rp 300.000	DAU / APBD
			Rp 9.872.000	DAU / APBD
			Rp 4.200.000	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			Rp 36.000.000	DAU / APBD
			Rp 92.537.370	DAU / APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		Rp 7.190.000	
		1 unit	7.190.000	DAU / APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rp 23.100.000	
		3 unit	Rp 15.400.000	DAU / APBD
			Rp 6.500.000	DAU / APBD
			Rp 1.200.000	DAU / APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	
		1 Unit	-	DAU / APBD
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	100%	Rp 1.407.287.900	DAU / APBD
	Persentase Informasi yang dipublikasikan	100%		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik	53 PPID	Rp 1.407.287.900	DAU / APBD
	Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi Publik Milik Pemkab	410 berita		
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik		Rp 44.720.000	
		3 dokumen	-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 42.000.000	DAU / APBD
			Rp 2.720.000	DAU / APBD
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp 140.460.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			Rp 106.800.000	DAU / APBD
		12 Dokumen	Rp 33.660.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp 239.160.000	
		12 Dokumen	Rp 197.400.000	DAU / APBD
			Rp 41.760.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp 238.980.400	
		6 Dokumen	-	DAU / APBD
			Rp 62.400.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 35.897.400	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 10.362.000	DAU / APBD
			Rp 100.000.000	DAU / APBD
			Rp 18.000.000	DAU / APBD
			Rp 12.321.000	DAU / APBD
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik		Rp 31.038.500	
		1 dokumen	Rp 20.400.000	DAU / APBD
			Rp 1.360.000	DAU / APBD
			Rp 8.528.500	DAU / APBD
			Rp 750.000	DAU / APBD
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		Rp 450.954.000	
		23 Layanan	Rp 40.800.000	DAU / APBD
			50.000.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			2.154.000	DAU / APBD
			Rp 358.000.000	DAU / APBD
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan		Rp -	
		2 dokumen	Rp -	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		Rp 108.000.000	
		12 dokumen	Rp 108.000.000	DAU / APBD
Penguatan kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya		Rp 36.395.000	
		60 orang	Rp 21.600.000	DAU / APBD
			Rp 1.360.000	DAU / APBD
			Rp 900.000	DAU / APBD
			Rp 6.400.000	DAU / APBD
			Rp 1.185.000	DAU / APBD
			Rp 3.750.000	DAU / APBD
			Rp 1.200.000	DAU / APBD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		Rp 117.580.000	
			-	DAU / APBD
			Rp 4.940.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
		12 Dokumen	Rp 6.480.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 3.000.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 20.160.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 18.000.000	DAU / APBD
			Rp 63.600.000	DAU / APBD
			Rp 1.400.000	DAU / APBD
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	100%	Rp 2.287.537.450	DAU / APBD
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 1.494.921.450	DAU / APBD
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		Rp 100.000	
		1 Domain	Rp 100.000	DAU / APBD
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 15.576.000	
		96 dokumen	Rp 15.576.000	DAU / APBD
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp 1.479.245.450	
		1 unit	Rp 1.187.173.450	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 179.960.000	DAU / APBD
			Rp 112.112.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			
		Rencana Tahun 2022			
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	2	3	4	5	
			-	DAU / APBD	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal	1 Pusat Data	Rp 792.616.000	Rp 792.616.000	DAU / APBD
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			Rp 201.800.000	
		1 dokumen	Rp 200.000.000		DAU / APBD
			Rp 1.800.000		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			Rp 464.916.000	
		1 Unit	Rp 44.400.000		DAU / APBD
			Rp 386.760.000		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			Rp 16.500.000		DAU / APBD
			Rp 2.500.000		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			Rp 9.728.000		DAU / APBD
			Rp 5.028.000		DAU / APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			Rp 7.500.000	
		27 PD	Rp 7.500.000		DAU / APBD
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang			Rp 118.400.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Elektronik	Dikembangkan			
		62 Unit	Rp 68.400.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 50.000.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			-
		0 dokumen	-	DAU / APBD
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			-
		1 dokumen	-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			-	DAU / APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	80%	Rp 28.683.000	DAU / APBD
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	28 Data	Rp 28.683.000	DAU / APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan		Rp 4.683.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022		
		Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
		12 dokumen	Rp 363.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
			Rp 4.320.000	DAU / APBD
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			-
		80 Orang	-	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		Rp 24.000.000	
		28 Dokumen	Rp 24.000.000	DAU / APBD
			-	DAU / APBD
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik			-
		1 Unit	-	DAU / APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	Rp 7.213.500	DAU / APBD
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi radio	100%	Rp 7.213.500	DAU / APBD
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Rp 7.213.500
		1 Laporan	Rp 7.213.500	DAU / APBD
			Rp -	DAU / APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022			
		Rencana Tahun 2022			
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Sumber Dana
1	2	3	4		5
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	100%	-		DAU / APBD
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			-	
		20 PD	-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD
			-		DAU / APBD

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Lumajang, Agustus 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



Pembina Utama Muda
NIP. 19670606 199202 1 001